

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**

PENGADILAN AGAMA BIMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <i>Catatan :</i> Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <i>Catatan :</i> Tn = sisa perkara tahun berjalan Tn1 = sisa perkara tahun sebelumnya Sisa perkara adalah perkara yg belum diputus pada tahun berjalan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Porsentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum. - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <i>Catatan : Upaya hukum adalah Banding, Kasasi dan PK Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</i>	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	Indeks kepuasan pencari keadilan <i>Catatan :</i> PERMENPAN No. Kep/25/M.PAN/2/2001 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan tahunan

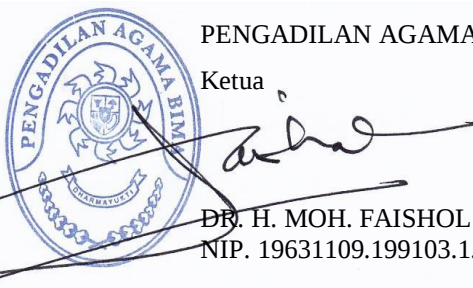
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Porsentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Porsentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi	$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan lewat mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dimediasi}} \times 100 \%$ <i>Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Porsentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yg dimohonkan banding, kasasi, PK}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Porsentase putusan yang menarik perhatian masyarakat, yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan yang upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Porsentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <i>Catatan : PERMA no. 1 tahun 2014, pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu</i>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Porsentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</u> x 100% Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan Catatan : PERMA N0.1 Tahun 2014 Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling.	Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Porsentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	<u>Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan</u> x 100% Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Porsentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu <u>yang mendapat layanan bantuan hukum</u> x 100% jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Porsentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)	<u>Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti</u> x 100% Jumlah putusan perkara yang sudah BHT Catatan : BHT = berkekuatan hukum tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Bima, 8 Januari 2018

PENGADILAN AGAMA BIMA,

Ketua



DR. H. MOH. FAISHOL HASANUDDIN, SH., MH.
NIP. 19631109.199103.1.004

